

PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK PEMILIH PEMULA MELALUI PEMBELAJARAN PPKn DI PERSEKOLAHAN

Hariyanti¹, Gigieh Cahya Permady²

¹Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Riau

² Prodi Manajemen Transportasi Laut, Politeknik Pelayaran Sorong, Papua

hariyanti@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan pemilih bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang program, tahapan, jadwal, proses, makna serta pentingnya pemilihan umum di dalam negara demokrasi Indonesia. Artikel ini menggunakan metode *literature review* dalam menganalisis masalah dan mencari solusi melalui analisis teori dan hasil penelitian mengenai permasalahan terkait. Selama ini pendidikan pemilih untuk segmen pemilih pemula cenderung dilakukan hanya menjelang pemilu (tidak berkesinambungan) dan kurang memberdayakan guru pendidikan kewarganegaraan (PKn) di sekolah padahal materi kepemiluan merupakan bagian integral dari PKn. Solusi atas permasalahan tersebut dapat diurai sebagai berikut (1) membangun Sinergitas antara MGMP PKn dengan penyelenggara pemilu di daerah melalui pengintegrasian materi kepemiluan dalam perangkat pembelajaran PKn; (2) pembentukan komunitas pemilih cerdas di sekolah; (3) Pembuatan buku saku kepemiluan untuk peserta didik sebagai pemilih pemula dan menggunakan media pembelajaran kepemiluan yang edukatif; (4) Menggunakan budaya/kearifan lokal dalam penyampaian pesan nilai-nilai kepemiluan sehingga menarik dan mudah dipahami

ABSTRACT

Voter education aims to increase knowledge and understanding of the program, stages, schedule, process, meaning and importance of elections in Indonesia's democracy. This article uses the literature review method in analyzing problems and finding solutions through theoretical analysis and research results on related problems.. So far, voter education for the novice voter segment tends to be carried out only before the election (not sustainable) and does not empower civic education (PKn) teachers in schools even though electoral material is an integral part of Civics. Solutions to these problems can be described as follows: (1) building synergy between PKn MGMP and regional election administrators through integrating electoral materials into Civics learning tools; (2) the formation of a smart voter community in schools; (3) Making an electoral pocket book for students as novice voters and using educational election learning media; (4) Using local culture/wisdom in delivering messages of electoral values so that they are interesting and easy to understand

Kata kunci:

*Pemilih Pemula,
Pendidikan Pemilih,
Pendidikan
Kewarganegaraan*

Keywords:

*Beginner Voters, Voter
Education, Citizenship
Education*

Pendahuluan

Pemilihan umum atau sering disingkat pemilu merupakan persyaratan inti sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat (Miriam Budiardjo, 2013:461). Dapat dikatakan bahwa pemilihan umum merupakan praktik politik ketatanegaraan yang umumnya dilakukan hampir semua negara di dunia dalam pemilihan pemimpin/penyelenggara negara (Casmir Arrsa, 2014). Namun, dalam kenyataannya terdapat

pemilihan umum dengan tingkat partisipasi politik yang rendah. Dengan kata lain, relatif banyak warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya atau dikenal dengan istilah golongan putih (golput) maupun menggunakan hak pilih namun hanya untuk sekedar menjalankan hak tersebut tanpa benar-benar memahami pentingnya pemilihan umum seperti pada pemilih pemula. Terhadap permasalahan ini, salah satunya dapat dikurangi melalui pendidikan pemilih. Menurut Nur Budi Hariyanto (dalam Andi Faisal, 2012:144) Pendidikan pemilih berisikan tentang pemahaman prosedur pemilihan untuk warga negara yang telah berhak memilih. Dari pendidikan ini diharapkan pemilih pemula berpartisipasi dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih. Tidak hanya itu, mereka diharapkan ikut mengawasi jalannya pemilu, setidaknya penyelenggaraan yang harus sesuai dengan prosedur yang benar.

Pendidikan pemilih bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang program, tahapan, jadwal, proses pemilihan umum dan makna serta pentingnya pemilihan umum di dalam negara demokrasi Indonesia. Selain itu, juga untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Pendidikan pemilih bagi peserta didik yang masih duduk di bangku persekolahan merupakan upaya untuk mempersiapkan mereka menjadi pemilih cerdas sejak dini (Hariyanti & Sari, 2021). Menurut Arman Nursal (2004;129) pemilih pemula memiliki makna penting, yakni menjadi perebutan suara dalam pemilu. Jadi, dapat dikatakan bahwa pemilih pemula kerap hanya dijadikan objek untuk mendulang suara menjelang pemilu. Pendidikan pemilih *urgent* diberikan kepada pemilih pemula karena mereka digambarkan sebagai pemilih yang labil, menentukan pilihan berdasarkan tampilan luar atau popularitas, memiliki pengetahuan politik yang relatif rendah dan cenderung didominasi oleh kelompok teman sebaya (*peer group*) sehingga datang ke TPS hanya sekedar menggugurkan hak pilihnya. Pemilih pemula umumnya masih berstatus sebagai peserta didik dan duduk di bangku persekolahan, khususnya yang duduk di bangku kelas XII, sehingga pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan wahana bagi pelaksanaan pendidikan pemilih di sekolah.

Selama ini pendidikan pemilih untuk segmen pemilih pemula cenderung dilakukan hanya menjelang pemilihan umum (tidak berkesinambungan), tidak dilakukan secara komprehensif dan sistematis (Rafni & Suryanef, 2019), serta kurang memberdayakan guru PKn di sekolah padahal materi kepemiluan merupakan bagian integral dari PKn. Peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah dan memiliki intensitas berinteraksi yang lebih sering dengan warga sekolah termasuk guru PKn. Seharusnya hal ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi politik peserta didik sebagai pemilih pemula terkait dengan pengetahuan seputar kepemiluan. Namun peran sekolah dalam menumbuhkan literasi politik bagi pemilih pemula kurang optimal. Permasalahannya saat ini adalah pengetahuan tentang politik, demokrasi dan pemilu masih sebatas pengetahuan prosedural hak dan kewajiban warga negara, apalagi pada kemampuan teknis dan artikulasi dalam perilaku politik. Artikel ini bertujuan mengelaborasi serta memberikan solusi atas permasalahan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula serta peranan pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan politik di sekolah dalam meningkatkan literasi politik pemilih pemula terkait dengan materi kepemiluan.

Metode

Tulisan ini menggunakan metode kajian literatur berupa teori-teori dan hasil penelitian yang terkait dengan tema pembahasan. Metode kajian literature merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam

proses penulisan. Pembahasan tema dilakukan secara deskriptif dan selanjutnya menghasilkan kesimpulan yang bersifat induktif.

Hasil dan Pembahasan

Masalah pendidikan politik dan pendidikan kewarganegaraan bagi suatu negara-bangsa merupakan proses pembinaan, penanaman, dan pewarisan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan yang diselenggarakan dalam lingkungan pendidikan, karena pendidikan dipandang memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Menurut Langeveld (dalam Hasbullah:2008), pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaannya atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan hidupnya sendiri, pengaruh itu datangnya dari orang dewasa dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik di sekolah berusaha membentuk peserta didik untuk melek politik (*political literacy*). Hal ini dilakukan agar peserta didik nantinya dapat menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*to be a good and smart citizenship*) yakni warga negara yang mengetahui hak, kewajiban, tanggung jawab dan kedudukan politiknya di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengetahuan dan pemahaman seputar politik, demokrasi, sistem pemerintahan, kebijakan publik, pemilihan umum merupakan bekal yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mewujudkan hal tersebut. Inilah tugas dan tanggung jawab guru pendidikan kewarganegaraan di sekolah dalam kaitannya sebagai pendidik yang memberikan bekal pengetahuan yang akan dibutuhkan oleh peserta didik agar menjadi pribadi yang otonom dalam berpikir dan menentukan keputusan politik dalam hidupnya.

Selain guru PKn, pengetahuan seputar pemilu dan demokrasi juga disampaikan oleh penyelenggara pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang diberikan amanat langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 22 E ayat 5. Penyampaian informasi kepemiluan kepada masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pendidikan pemilih merupakan salah satu tugas dan kewenangan KPU. Pendidikan pemilih (*voters education*) bukanlah program yang hanya dapat dilakukan menjelang digelarnya hajatan Pemilu (pemilihan umum) namun lebih kepada pola kegiatan yang berkesinambungan (*continue*). Pendidikan pemilih penting untuk dilakukan kepada pemilih pemula karena berkaitan dengan transfer pengetahuan politik untuk mencapai kompetensi kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan untuk menjadi warga negara yang partisipatif. Keikutsertaan dalam pemilu merupakan bentuk dari partisipasi warga negara (Aprilia & Azmi, 2021). Kegiatan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu, namun juga dapat dilakukan oleh semua elemen bangsa termasuk guru di sekolah utamanya guru Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengingat pemilihan umum merupakan urusan setiap warga negara karena hasil pemilu dapat mempengaruhi kehidupan warga negara dan menentukan nasib bangsa.

Guru-guru pendidikan kewarganegaraan yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (MGMP PKn) merupakan salah satu pihak terkait yang memiliki tanggung jawab akademik dalam membentuk peserta didik menjadi pemilih yang cerdas, rasional dan otonom dalam menentukan pilihan suara dalam pemilu. Hal ini dikarenakan tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik yakni warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Menggunakan hak pilih dalam pemilu merupakan salah satu hak warga negara yang hendaknya digunakan secara cerdas dan bertanggung jawab. Selain itu, materi kepemiluan juga merupakan bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan. Menurut Prof Abdul Azis Wahab dan Prof Sapriya (2011:96) pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang kajian yang

bersifat *multifacet* dengan konteks lintas bidang keilmuan sehingga konsep pemilihan umum yang merupakan kajian disiplin ilmu politik juga dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan mengingat disiplin ilmu politik merupakan disiplin ilmu pendukung utama pendidikan kewarganegaraan disamping ilmu hukum dan Ilmu pendidikan. Keduanya berada dalam bidang *social studies*.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana bagi pelaksanaan pendidikan pemilih di sekolah. Pendidikan kewarganegaraan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik untuk menjadi warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya. Menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum merupakan hak setiap warga negara yang harus digunakan secara cerdas agar dapat menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas dan pemimpin yang tepat. Berdasar kepada pernyataan diatas, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PKn dapat diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan pemilih yang berkesinambungan mengingat materi kepemiluan merupakan bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan

Problematika yang paling mendasar terkait dengan pelaksanaan pendidikan pemilih dalam hal ini kaitannya dengan pemilih pemula adalah pendidikan pemilih yang tidak berkesinambungan. Padahal konsep kepemiluan, demokrasi, sistem pemerintahan merupakan masalah yang dinamis seiring dengan perkembangan pemerintahan dan ketatanegaraan sehingga perlu pengetahuan dan pemahaman peserta didik perlu terus ditambah dan diperbaharui. Rusadi Kartaprawira (dalam Sunatra:2016:43) menyarankan agar pendidikan politik dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik politik sangat kompleks, bersegi banyak dan berubah-ubah. Selama ini telah terdapat beberapa program pendidikan pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum kepada beberapa segmen pemilih termasuk pemilih pemula namun semuanya hanya dilakukan menjelang pemilu dan tidak bersifat berkesinambungan seperti program kelas pemilu yang digulirkan pada 2012-2013 dan program relawan demokrasi menjelang pemilihan *legislatif* 2014. Hal ini sungguh disayangkan mengingat program pendidikan pemilih bagi pemilih pemilih pemula terkesan hanya sekedar dijalankan untuk menggugurkan kewajiban penyelenggara dalam melaksanakan perintah undang-undang

Ada beragam strategi dalam pelaksanaan Pendidikan pemilih kepada masyarakat seperti melalui program relawan demokrasi yang dilakukan setiap menjelang pemilu, pembentukan rumah pintar pemilu pada setiap kabupaten kota, sosialisasi pemilu yang dilaksanakan setiap menjelang pemilu oleh penyelenggara pemilu, serta pembentukan komunitas peduli pemilu dan demokrasi namun kesemua itu tidak bersifat berkesinambungan dan tidak melibatkan guru PPKn sebagai sosok yang dianggap tepat dalam pembentukan kompetensi kewarganegaraan (Hariyanti & Hambali, 2021; Kurniadi, Y U., 2020). Sinergitas antara Komisi Pemilihan Umum dan MGMP PKn merupakan strategi yang baik untuk pelaksanaan pendidikan pemilih yang berkesinambungan kepada peserta didik di sekolah, selain itu sinergitas tersebut diperlukan untuk menemukan materi kepemiluan yang bersifat komprehensif, metode penyampaian yang interaktif dan mudah diterapkan, serta media kepemiluan yang menarik. Berikut merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam penyampaian informasi kepemiluan bagi pemilih pemula di sekolah,

a. *Sinergitas guru MGMP Pendidikan Kewarganegaraan dengan Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Literasi Politik Pemilih Pemula*

Sinergitas antara guru pendidikan kewarganegaraan yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP PKn) merupakan salah strategi yang cocok jika yang dituju adalah segmen pemilih pemula yang masih duduk di bangku persekolahan (Hambali et al., 2021). Strategi ini dilakukan mengingat beberapa faktor-faktor pendukung sebagai berikut:

- 1) Materi kepemiluan merupakan bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan.

Dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan (PKn) SMA/MA/SMK, materi mengenai pemilihan umum dan demokrasi dipelajari di kelas XI. Di dalam materi tersebut termuat mengenai dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum, pengertian pemilihan umum, sistem pemilihan umum, peserta pemilihan umum, hingga hubungan antara pemilihan umum dan demokrasi.

- 2) Guru pendidikan kewarganegaraan merupakan sosok yang dekat dengan keseharian peserta didik

Guru di sekolah dalam hal ini guru pendidikan kewarganegaraan memiliki *intensitas* waktu yang lama dalam bersosialisasi dengan peserta didik di sekolah sehingga mempunyai kesempatan untuk menginternalisasikan nilai-nilai kepemiluan dan sikap demokratis yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif dan partisipatif. Hal serupa diungkapkan oleh Abdul Aziz Wahab (2011:50) bahwa PKn sebagai mata pelajaran persekolahan bertujuan untuk mewujudkan partisipasi penuh nalar tanggung jawab dalam kehidupan dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Untuk dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh tanggung jawab dalam urusan-urusan publik diperlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan berperan serta. Pemilihan umum merupakan salah satu urusan publik yang menuntut partisipasi aktif setiap warga negara tidak terkecuali peserta didik yang telah memiliki hak suara (Le & Nguyen, 2021). Pengetahuan dan pemahaman yang baik dan jelas terkait dengan kepemiluan merupakan modal bagi peningkatan kualitas demokrasi dan pemeliharaan sistem politik demokrasi yang ada.

- 3) Sekolah merupakan tempat yang tepat sebagai sarana penyampaian informasi kepemiluan kepada peserta didik.

Peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah yakni lebih dari 7 jam. Menurut Nur Budi Hariyanto (dalam Andi Faisal,2010) Sekolah merupakan tempat paling efektif dalam menjangkau pemilih pemula. Di tengah kesibukan sekolah yang sangat ketat, penting mengupayakan agar kegiatan pendidikan pemilih dalam rangka menciptakan literasi politik menjadi bagian dari mata pelajaran sekolah yang sudah ada (Nanggala, 2020). Pendidikan pemilih tidak hanya menyangkut seputar pemilu tetapi lebih luas dari itu yakni bagaimana mengedukasi pemilih menjadi warganegara yang cerdas, rasional, mandiri dalam menentukan sikap bahkan dapat mengawasi jalannya pemerintahan (Mullins, 2016; Rozuli & Haboddin, 2018; Yoldaş, 2015). Pendidikan pemilih menjadikan warga negara mampu berhadapan dengan pemerintahan.

- b. Pembentukan komunitas pemilih cerdas di masing-masing Sekolah Menengah Atas dimana guru MGMP PKn tersebut mengajar.*

Peserta didik sebagai pemilih pemula digambarkan sebagai pemilih yang didominasi oleh kelompok teman sebaya (*peer group*), hal ini dimaklumi karena peserta didik di bangku sekolah menengah tergolong pada usia remaja yang lebih dekat dan mudah dipengaruhi oleh kelompok teman sebaya. Ciri-ciri usia remaja ini dapat diarahkan menuju hal yang positif. Pembentukan kelompok pemilih cerdas yang terdiri dari semua peserta didik yang ada di suatu sekolah dapat menciptakan suasana pembelajaran kepemiluan yang santai dan komunikatif. Komisioner KPU daerah tempat dimana sekolah tersebut berada dapat menjadi pembina komunitas pemilih cerdas dibantu oleh MGMP PKn melalui anggota-anggotanya di sekolah masing-masing. Komisioner KPU daerah membagi tugas dengan mendatangi sekolah-sekolah menengah yang ada di wilayah kerjanya dalam jangka waktu tertentu misalnya sebulan sekali namun dilakukan secara berkelanjutan. Komunitas ini bertujuan untuk membentuk kesamaan pandangan tentang pentingnya pemilu di Indonesia dan peran peserta didik sebagai warga negara dalam negara demokratis salah satunya adalah menjadi pemilih yang cerdas, rasional dan otonom. Melalui dialog langsung dengan komisioner KPU daerah

akan mendatangkan semangat dan memunculkan rasa ingin tahu peserta didik seputar kepemiluan karena berhadapan langsung dengan pihak yang berkepentingan dan berwenang.

Dialog dengan komisioner KPU daerah dilakukan dengan sistem perwakilan kelas di sekolah yang bersangkutan. Artinya setiap kelas mengirimkan 2-5 perwakilan. Perwakilan inilah nantinya diharapkan menyampaikan informasi kepemiluan kepada teman sekelasnya. Guru pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi fasilitator dalam kelas terkait dengan penyampaian informasi kepemiluan oleh perwakilan kelas kepada teman-temannya. Penyampaian informasi kepemiluan oleh teman sebaya dalam suasana yang santai dan rileks seperti komunikasi dalam pertemanan sehari-hari merupakan strategi yang cukup efektif dalam meningkatkan literasi politik peserta didik. Selain itu, sistem perwakilan kelas ini tidak mengganggu aktivitas belajar dan waktu peserta didik. Pertemuan komunitas dapat dilakukan di hari sabtu yang umumnya digunakan sebagai hari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Selain itu, dialog dengan komisioner KPU daerah juga dapat menjadi ajang Tanya jawab seputar isu-isu kepemiluan terkini oleh peserta didik serta mempertanyakan materi-materi yang kurang dipahami dalam buku saku kepemiluan.

c. *Pembuatan buku saku kepemiluan untuk peserta didik sebagai pemilih pemula.*

Buku saku kepemiluan merupakan media yang cocok digunakan dalam penyampaian informasi kepemiluan kepada peserta didik. Buku saku tersebut dirancang dengan muatan materi sebagai berikut pengertian pemilu, sejarah pemilu di Indonesia, jenis-jenis pemilu di Indonesia, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dasar hukum penyelenggaraan pemilu, system pemilu di Indonesia, tahapan pemilu, proses dan makna serta arti pentingnya pelaksanaan pemilu dalam negara demokrasi, kiat-kiat menjadi pemilih cerdas, peranan pemilih dalam pengawasan terhadap proses pemilu yang demokratis, proses penyelesaian masalah hukum kepemiluan serta praktik-praktik pemilu di beberapa negara. Buku saku tersebut dirancang dengan model yang menarik dan disertai dengan gambar-gambar kepemiluan yang berwarna dan komunikatif sehingga materi kepemiluan yang termuat di dalamnya dapat dengan mudah dicerna oleh peserta didik. Diperlukan penyampaian materi yang menarik sebab pemilih pemula merupakan pemilih yang mempunyai ciri khas dan berbeda dengan sasaran pemilih lainnya (Suryanef & Rafni, 2020; wisnu dani prasetyo, toni harsan, 2019). Sebelumnya,kerjasama MGMP PKn dengan komisi pemilihan umum terkait dengan pembuatan panduan kepemiluan berbentuk modul kelas pemilu untuk pemilih pemula telah pernah dilakukan pada sekitar 2012 lalu.KPU Kota Padang bekerjasama dengan MGMP Pkn Kota Padang membuat sebuah modul kelas pemilu untuk peserta didik SMA/SMK/MA di Kota Padang (Hariyanti, 2015). Namun, terdapat beberapa permasalahan dari pelaksanaan pendidikan pemilih ini, diantaranya (1) modul kelas pemilu tidak dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PKn ataupun tidak ada jam khusus untuk menerapkan modul kelas pemilu di sekolah-sekolah yang tidak menjadi sekolah sasaran kelas pemilu oleh KPU Kota Padang. Hal ini tentu mengakibatkan tidak meratanya pengetahuan seputar pemilihan umum di kalangan peserta didik sebagai pemilih pemula; (2) waktu penyampaian materi dalam modul kelas pemilu yang sempit karena sekolah tidak menyediakan waktu khusus untuk pelaksanaan kelas pemilu, jika menggunakan jam pelajaran pendidikan kewarganegaraan maka tentu akan mengganggu dan menghambat tujuan pencapaian materi lain yang telah disusun oleh guru pendidikan kewarganegaraan mengingat materi kepemiluan bukanlah satu-satunya materi yang ada dalam silabus PKn; (3) kemasan modul kelas pemilu yang kurang menarik karena seperti buku teks yang menggambarkan materi kepemiluan secara panjang sehingga kurang menimbulkan minat baca peserta didik.

Menurut penulis, permasalahan tersebut dapat diantisipasi dengan pengintegrasian materi-materi kepemiluan dalam Perangkat Pembelajaran PKn yakni Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) melalui materi-materi PKn yang terkait dengan pemilu seperti budaya politik dan sistem

pemerintahan. Hal ini diserahkan pada kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab guru dalam membentuk peserta didik menjadi pemilih yang cerdas dan rasional guna mewujudkan warga negara yang aktif dan partisipatif. MGMP PKn memegang peranan penting dalam mengarahkan guru-guru pendidikan kewarganegaraan dalam pengintegrasian materi ke pemilu dalam RPP melalui diskusi bersama terkait dengan materi. Hal ini dilakukan agar pendidikan pemilih dapat dilakukan secara berkelanjutan, tidak membutuhkan waktu atau jadwal khusus yang dapat menambah beban belajar peserta didik. Langkah ini didukung dengan adanya buku saku ke pemilu yang dibuat bersama oleh KPU dan MGMP PKn sehingga peserta didik memiliki bahan yang akan didiskusikan dalam setiap pertemuan serta memungkinkan guru pendidikan kewarganegaraan memantau pemahaman peserta didik terkait materi ke pemilu.

d. *Metode penyampaian materi ke pemilu dengan menggunakan budaya kearifan lokal*

Metode yang menarik dan mudah dipahami merupakan salah satu kunci efektifnya pelaksanaan suatu program. Penyampaian materi ke pemilu dengan menggunakan budaya kearifan lokal merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan di sekolah. Artinya, kearifan lokal ini diakomodir menjadi kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Kearifan lokal dalam penyampaian materi ke pemilu membuat proses penyampaian materi menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik karena dilakukan berdasar pada bahasa dan gaya-gaya keseharian setempat. Menurut Sunatra (2016) sejalan dengan pendidikan politik, pembinaan tradisi perlu dilakukan yaitu suatu usaha untuk menproyeksikan nilai-nilai tradisional yang positif dari budaya bangsa ke dalam kehidupan politik. Kesenian tradisional suatu daerah dapat menjadi salah satu metode penyampaian materi ke pemilu. Contohnya, di Minangkabau, seni drama tradisional *randai* dapat menjadi salah satu metode yang menarik digunakan. Menurut Surya Darma Eka Sakti (2010) *Randai* adalah penyajian *kaba* Minangkabau dalam bentuk drama atau teater tradisional dengan pola lingkaran. Ia juga disebut sebagai teater rakyat populer bagi masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang merangkai lagu-lagu, tari, musik, seni bela diri, dan akting untuk menceritakan cerita-cerita rakyat Minangkabau. *Randai* merupakan salah satu bagian dari pengembangan kultur budaya dan nilai-nilai tradisional bagi masyarakat Minangkabau, yang lahir bersamaan dengan kedatangan masyarakat di mana adat tersebut adalah kesepakatan nilai-nilai budaya selaku masyarakat sosial. Dalam pertunjukan *randai* terdapat beragam unsur pendukung, seperti: unsur musik, tari, vokal (dendang), silat, seni teater, kostum dan teks. Baik-buruknya pertunjukan *randai* tergantung dari bagaimana para pemain *randai* membawakan cerita teks. Teks *randai* pada garis besarnya bertujuan untuk: (1) penggambaran tradisi kehidupan masyarakat yang penuh lika-liku peristiwa, (2) penggambaran kultur budaya adat masyarakat Minangkabau, (3) penggambaran masyarakat seperti merantau, kesenian anak nagari, silat, tari, musik dan sastra, (4) untuk menyampaikan pesan adat dan agama (media informasi dan pendidikan), (5) media hiburan dan sarana untuk berkomunikasi antar masyarakat sambil menyaksikan pertunjukan *randai*

Randai merupakan seni drama tradisional Minangkabau yang dapat menjadi metode penyampaian informasi ke pemilu yang menarik, mudah dipahami dan efektif karena menggunakan bahasa dan gaya komunikasi masyarakat setempat. *Randai* dapat dijadikan salah satu kegiatan ekstrakurikuler seni di sekolah, kemudian guru pendidikan kewarganegaraan bekerjasama dengan guru kesenian untuk menciptakan sebuah cerita *randai* yang mencerminkan nilai-nilai ke pemilu dan ajakan kepada peserta didik untuk menjadi pemilih yang cerdas. Contohnya, dapat saja diambil mengenai cerita keseharian di keluarga bagaimana seorang mamak mengedukasi kemenakannya agar pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menyalurkan hak suara menurut keyakinan hati nurani atau bagaimana seorang penghulu menghimbau kaumnya untuk memilih pemimpin yang tepat. Jalan cerita, tokoh, latar, musik dan aksesoris penampilan *randai* diserahkan kepada kreativitas

dan kerjasama antara guru-guru pendidikan kewarganegaraan dan guru-guru kesenian di sekolah yang bersangkutan. Para penampil randai dapat diambil dari komunitas pemilih cerdas yang telah dibentuk oleh Komisi pemilihan umum setempat dan MGMP PKn. Latihan dan Pertunjukan randai yang edukatif ini dapat ditampilkan di hari-hari yang tidak mengganggu proses belajar mengajar peserta didik.

Selain itu, metode penyampaian informasi kepemiluan juga dapat dilakukan melalui simulasi pemberian dan pemungutan suara seperti yang terjadi TPS. Hal ini bertujuan untuk memberikan contoh nyata dan pengalaman belajar yang menarik bagi peserta didik. Metode ini sebelumnya telah dilakukan oleh KPU pada 2012 lalu dalam program kelas pemilu. Kelas pemilu merupakan wujud implementasi dari metode Bridge yang didapatkan dalam pelatihan instruktur pemilu yang dilaksanakan oleh KPU RI bekerjasama dengan KPU Australia /AEC (*Australian Election Commission*). Metode ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemilih terhadap pemilihan umum dengan memberikan sedikit teori dan lebih banyak praktek serta menekankan pada proses belajar mengajar dengan sedikit teori, tetapi lebih banyak praktik, diskusi, dan permainan serta simulasi sehingga dengan dengan begitu proses penyampaian informasi pemilihan umum mudah diserap oleh peserta karena dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Pendidikan pemilih melalui penyampaian metode yang menarik diharapkan dapat membentuk kesadaran pemilih pemula akan hak dan kewajiban, memperbaiki kuantitas dan kualitas pemilu (Hariyanti, 2015; Iskandar & Marlina, 2019).

Simpulan

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik yakni warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya. Menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum merupakan hak setiap warga negara yang hendaknya digunakan secara cerdas agar dapat menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas dan pemimpin yang tepat. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka sebaiknya pendidikan pemilih yang dilakukan di sekolah melalui pendidikan kewarganegaraan dilakukan dengan sinergitas antara komisi pemilihan umum dan MGMP PKn, membentuk komunitas pemilih cerdas di sekolah menengah, pembuatan buku saku kepemiluan dengan pemuatan materi yang komprehensif dan dikemas dengan tampilan buku yang berwarna, menarik dan edukatif serta penyampaian materi kepemiluan dengan menggunakan budaya kearifan lokal dan simulasi pemilu. Pendidikan pemilih yang berkesinambungan melalui sinergitas antara Komisi Pemilihan Umum merupakan kunci untuk mewujudkan pemilih pemula yang cerdas, rasional dan otonom sehingga direkomendasikan agar pendidikan pemilih melalui wahana pendidikan kewarganegaraan di sekolah dilakukan dengan menggunakan strategi, materi, media serta metode yang telah dipaparkan.

Referensi

- Bakti, A. F. (Eds). (2012). *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*. Churia: Jakarta.
- Budiardjo, M. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka: Jakarta
- Hasbullah. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Kependidikan*. Jakarta: Gramedia.
- Komisi Pemilihan Umum. (2010). *Modul 1: pemilu untuk pemula*, cet. Pertama. Komisi Pemilihan Umum: Jakarta.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. (2012). *Modul Kelas Pemilu*.
- Sunatra. (2016). *Pendidikan politik kewarganegaraan*. Bandung: Lekkass

Wahab, A. A dan Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung:Alfabeta.

Artikel jurnal

- Aprilia, C. R., & Azmi, A. (2021). Sosialisasi Pemilu Tahun 2019 Terhadap Pemilih Pemula oleh KPU Kabupaten Solok Selatan. *Journal of Civic Education*, 4(1), 32–38. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i1.439>
- Casmi Arrsa, R. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 169. <http://www.ppotoda.orgnaskahditerima:4/8/2014revisi:18/8/2014disetujui:29/8/2014>
- Hambali, H., Hariyanti, H., & Eddison, A. (2021). The model of voter education of women-based democracy volunteers. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 48–60. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.33224>
- Hariyanti. (2015). *pelaksanaan pendidikan pemilih melalui kerjasama KPU Kota Padang dengan MGMP PPKn SMA/SMK kota padang. skripsi*, 2013.
- Hariyanti, & Hambali. (2021). Identifikasi Kendala Relawan Demokrasi Basis Perempuan sebagai Fasilitator Pendidikan Pemilih di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. *Journal of Moral and Civic Education*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.24036/8851412512020490>
- Hariyanti, & Sari, F. A. (2021). Election Smart House (ESH) as a Pre-Voter Political Education Facility To improve the quality of democracy. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.26618/jed.v6i1.3940>
- Iskandar, D., & Marlina, N. (2019). Pendidikan Pemilih Muda Cerdas Di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 01(01), 12–18. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpv/article/view/4713>
- Kurniadi, Y U., et al. (2020). Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Le, K., & Nguyen, M. (2021). Education and political engagement. *International Journal of Educational Development*, 85(April), 102441. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102441>
- Mullins, R. D. (2016). A review of The Political Classroom: Evidence and Ethics in Democratic Education. *Journal of Social Studies Research*, 40(2), 165–167. <https://doi.org/10.1016/j.jssr.2015.06.011>
- Nanggala, A. (2020). Citizenship Education as a Democracy Learning for Students in Higher Education. *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, 3(1), 69. <https://doi.org/10.31764/ijeca.v3i1.2067>
- Rafni, A., & Suryanef. (2019). Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula Melalui Rumah Pintar Pemilu. *Jurnal Of Moral and Civic Education*, 3(1), 1–8.
- Rozuli, A. I., & Haboddin, M. (2018). *Pendidikan Pemilih dan Penguatan Demokrasi*. 1(2), 129–148.
- Suryanef, S., & Rafni, A. (2020). First-Time Voter Education Through the Democracy Volunteer Movement. *Journal of Moral and Civic Education*, 4(2), 60–68. <https://doi.org/10.24036/8851412422020499>
- wisnu dani prasetyo, toni harsan, P. (2019). partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu 201 di kelurahan sumber kecamatan banjarsari kota surakarta. *CIVICS EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL(CESSJ) Volume 1 Nomor 2 Bulan Desember 2019*, 1, 70–93.
- Yoldaş, Ö. B. (2015). Civic Education and Learning Democracy: Their Importance for Political Participation of Young People. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 174(286), 544–549. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.703>